



KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanallahuwata'ala, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat.

Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk kesempumaan rancangan Peraturan Bupati ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak sehingga penyusunan Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat bisa diselesaikan.

Muna Barat, Maret 2026

(Penyusun)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
 BAB II POKOK PIKIRAN	
A. Gambaran Umum	4
B. Urgensi	5
C. Landasan Filosofis	7
D. Landasan Sosiologis	7
E. Landasan Yuridis	7
 BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	9
B. Saran	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan dinamika tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan cepat, Pemerintah Kabupaten Muna Barat perlu melakukan penataan organisasi perangkat daerah secara berkala. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sekretariat Daerah, sebagai unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif, memiliki struktur yang ramping namun kaya fungsi.

Sekretariat Daerah memegang peran sentral sebagai pusat koordinasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk mengoptimalkan alur kerja, memperjelas batasan tugas, serta menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, sehingga proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih akurat dan responsif.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apa urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat?
2. Apa yang menjadi landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

1. Mengetahui urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat.
2. Mengetahui landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat.

D. DASAR HUKUM

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Gambaran Umum

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Mengingat peran vitalnya sebagai "motor penggerak" birokrasi, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai struktur dan tata kelola internal agar Sekretariat Daerah mampu menjalankan fungsinya secara optimal, efektif, dan efisien. Menegaskan posisi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Kedudukan ini mencakup kewenangan dalam memberikan dukungan administratif dan koordinasi kebijakan kepada seluruh perangkat daerah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

Selain itu peraturan ini mengatur struktur internal Sekretariat Daerah secara hierarkis yang mencakup Asisten

Sekretaris Daerah, Bagian-bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Penataan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki beban kerja yang proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi serta arah kebijakan pembangunan daerah.

B. Urgensi

Urgensi ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai tindak lanjut atas penyesuaian regulasi di tingkat pusat mengenai kelembagaan daerah. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna menjamin bahwa setiap fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah memiliki landasan hukum yang kuat, terukur, dan akuntabel.

C. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari Peraturan Bupati ini berpijak pada hakikat bahwa pemerintahan daerah dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang prima.

D. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mencerminkan evolusi kebutuhan organisasi seiring dengan perkembangan Kabupaten Muna Barat.

E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memberikan legitimasi hukum bagi berlakunya Peraturan Bupati ini, yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran pengaturan Peraturan Bupati ini adalah Menciptakan struktur organisasi Sekretariat Daerah yang mampu merespons kebutuhan pimpinan daerah dan dinamika pembangunan dengan cepat, tepat, dan solutif. Jangkauan pengaturan yaitu mengatur secara menyeluruh kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja yang berlaku di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat. Arah pengaturan ditujukan untuk Mengarahkan organisasi menuju struktur yang lebih ramping, namun memiliki fungsi yang kuat dan efektif, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi nasional.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Bentuk, Nomenklatur Dan Tipe Perangkat Daerah;
3. Susunan Organisasi
4. Tata Kerja;
5. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan instrumen hukum yang sangat krusial dalam menata kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat agar lebih efektif, efisien, profesional, dan proporsional sesuai dengan dinamika kebutuhan birokrasi masa kini.
2. Dengan struktur organisasi yang adaptif dan berbasis prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta simplifikasi, regulasi ini diyakini mampu mendongkrak kualitas dukungan administratif terhadap kepemimpinan kepala daerah dalam mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Muna Barat.

B. Saran

Agar Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara optimal, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif dan masif kepada seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain agar terjadi kesamaan pemahaman terhadap alur tata kerja dan koordinasi yang baru.